

BAB I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Bahan Bakar Minyak merupakan bahan baku yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan, baik di negara berkembang dan juga di negara maju. Saat ini penggunaan bahan bakar tidak hanya berimplikasi pada politik luar, yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara tersebut, tetapi juga berdampak global yang menimbulkan kesengsaraan bagi seluruh rakyat.

Bahan bakar minyak adalah bahan baku yang mempunyai peranan penting dalam kebutuhan bahan bakar industri. Karena peranan yang penting, maka pengelolaannya harus dilakukan dengan cara yang sebaik mungkin agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pemerintah telah memberikan BBM subsidi kepada masyarakat yang berstatus menengah ke bawah dengan tujuan agar dapat dengan mudah memperolehnya. Memang untuk bahan bakar minyak, bisa dikatakan pemerintah tidak mensubsidi karena biaya produksi sebenarnya lebih rendah dari harga yang diumumkan. Namun, karena permintaan domestik yang lebih besar dari produksi dalam negeri, pemerintah harus mengimpor minyak dunia yang jauh lebih mahal dari harga yang dikenakan. Kenyataannya, yang diimpor juga tidak disubsidi oleh pemerintah karena pemerintah juga mengenakan harga yang berbeda untuk setiap industri.

Dalam Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2013 Pasal 3 dinyatakan, pentahapan pembatasan penggunaan jenis BBM tertentu untuk transportasi jalan berlaku untuk kendaraan dinas dan mobil barang dengan jumlah roda lebih dari 4 (empat) buah (dikutip dari <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/peraturan-menteri-esdm-no1tahun2013-angkutan-umum-tetap-mendapatkanbbmbersubsidi>, 2013). Dengan melihat dari peraturan Menteri tersebut sudah ada pembatasan penggunaan jenis bahan bakar tertentu untuk kendaraan dinas, larangan terhadap

kendaraan dinas untuk menggunakan bahan bakar bersubsidi sudah dijelaskan oleh pemerintah.

Berdasarkan latar belakang masalah, di Indonesia masih terdapat kendaraan dinas yang dioperasikan pemerintah yang menggunakan bahan bakar minyak bersubsidi yang dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah menyediakan bahan bakar minyak non-subsidi untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke atas dan untuk kendaraan yang tersebut di atas. Khususnya di Jawa Barat, Kota Bandung masih banyak masyarakat kalangan menengah ke atas yang mempunyai kendaraan mewah tetapi masih menggunakan Bahan Bakar bersubsidi.

Masih banyak kendaraan-kendaraan mewah yang seharusnya mampu untuk menggunakan Bahan Bakar non-subsidi tetapi masih menggunakan Bahan Bakar bersubsidi yang seharusnya bahan bakar minyak tersebut diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Bahan bakar minyak bersubsidi seharusnya dinikmati oleh golongan masyarakat menengah ke bawah, namun pada kenyataannya masih terdapat masyarakat golongan ke atas yang menggunakannya.

I.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan temuan yang ada pada latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang ada sebagai berikut:

- Kendaraan dinas yang dioperasikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masih menggunakan BBM bersubsidi.
- Terdapat masyarakat menengah ke atas yang mempunyai kendaraan mewah masih menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, khususnya di Kota Bandung.

I.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah yang dapat dikaji adalah sebagai berikut:

Bagaimana mempersuasi masyarakat terkait penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar tidak salah sasaran.

I.4 Batasan Masalah

Batasan masalah pada perancangan ini akan terfokus pada masyarakat menengah ke atas yang mempunyai kendaraan mewah yang masih menggunakan bahan bakar bersubsidi di Jawa Barat, khususnya Kota Bandung. Dikarenakan kurangnya edukasi atau kampanye mengenai sasaran/target dari Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Indonesia.

I.5 Tujuan dan Manfaat Perancangan

Dari rumusan yang telah didapat, maka tujuan dan manfaat dari melakukan perancangan ini adalah sebagai berikut:

I.5.1 Tujuan Perancangan

Berdasarkan temuan yang ada pada identifikasi masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan dari perancangan adalah sebagai berikut:

- Merancang informasi untuk mengajak masyarakat menengah ke atas yang mempunyai kendaraan mewah untuk tidak menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
- Mengubah pola pikir masyarakat mengenai Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

I.5.2 Manfaat Perancangan

Berdasarkan temuan yang ada pada identifikasi masalah di atas, maka dapat disimpulkan manfaat dari perancangan adalah sebagai berikut:

- Masyarakat sadar akan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

- Masyarakat paham akan aturan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diberikan oleh pemerintah.